BAB IV

ANALISA PERMASALAHAN

4.1. Analisa Terhadap Persyaratan Pengurusan Lalu Lintas Giral Dalam Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat

Persyaratan pengurusan lalu lintas giral terutama dalam pembayaran gaji pegawai negeri sipil pusat tidak akan berjalan dengan lancar apabila pihak bendaharawan gaji instansi belum mebuka rekening pada bank yang akan menjadi pembayarnya.

Selain itu dalam pengajuan SPPG, hendaknya bendaharawan instansi harus memperhatikan persyaratan yang lain terutama untuk mendukung keakuratan atau ketelitian dalam daftar penguji diamana dalam daftar gaji tersebut harus disertai dengan hasil hitungan pembuat daftar gaji bersangkutan. Dan apabila terjadi perubahan di dalam daftar gaji secara total, maka hendaknya bendaharawan gaji instansi harus segera memberikan tembusan atau rekamannya.

Perubahan atau informasi yang bersifat formal antara lain adalah:

1. Pembayaran gaji sudah dilakukan dengan mencatat tanggal dan nomornya.
2. Perubahan gaji yang dibayar, bertambah atau berkurang, atas dasar dokumen yang diterima KPKN, misalnya surat keputusan kenaikan gaji berkala, surat keputusan kenaikan pangkat, surat keputusan pindah tugas, dan lain sebagainya.

Hal seperti diuraikan di atas, bagi masyarakat luar (PNS dan Departemen dan Lembaga diluar Departemen Keuangan), kemungkinan belum tahu persis persoalannya. Namun demikian, sejauh ini, secara umum persyaratan pengurusan lalu lintas giral terutama dalam pembayaran gaji pegawai negeri sipil pusat yang dilaksanakan diwilayah kerja KPKN sudah baik karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2. Analisa Terhadap Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pada kenyataan sampai saat ini, tidak sedikit bendaharawan gaji instansi mengajukan SPPG bulanan serta daftar gajinya setelah lewat tanggal 10 setiap bulannya. Bahkan ada yang menyampaikannya ke KPKN (Loket) setempat setelah tanggal 15 bulan berikutnya. Hal ini sangat menyulitkan bagi KPKN dalam memproses secara tepat dan teliti.

Bila diikuti atau dilaksanakan menurut ketentuan yang seharusnya, KPKN tidak mungkin mampu untuk menerbitkan SPM gaji bulanan tepat pada waktunya, seandainya SPPG bulanan serta daftar gaji bari ditrima setelah lewat tanggal 15 bulan berkenaan.

Hal seperti diuraikan diatas, bagi masyarakat luar (PNS dan Departemen/Lembaga diluar depertemen keuangan), kemungkinan tidak mengerti persis persoalannya. Dan kalu diperhatikan perbandingan antara beban kerja KPKN, jumlh pegawai negeri sipil yang harus dilayani dan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebebenarna sidah merupan prestasi terendiri.

4.3. Analisa Terhadap Peranan Lalu Lintas Giral Dalam Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat

Semakin banyaknya kegiatan perusahaan yang melibatkan pembayaran dengan bank, seperti hal nya pembeyaran gaji pegawai negeri sipil pusat, mengakibatkan instansi pemerintahan semakin mudah dan rapih dalam penyelesaian pembayaaran gaji. Oleh sebab itu KPKN khususnya Seksi Bank Tunggai selaku pembayar harus menyelesaikan data-data pegawai guna mempermudah pelaksanaan pembayaran gaji pegawai negeri sipil.

Lalu lintas giral merupakan sarana untuk menyelesaikan transaksi pembayaran gaji pegawai negeri sipil pusat. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling mudah ditemukn disetiap Bank karena kegitan ini akan diselesaikan antar Bank Tunggak dengan Bank Tunggal Khusus yang menjadi pembayarnya.

Namun demikian, sejauh ini, pelaksanaan lalu lintas giral terutama dalam pembayayaan gaji pegawai negeri sipil pusat oleh Seksi Bank Tunggal sudah menjadi prestasi tersendiri.

4.4. Usulan Terhadap Persyaratan Pengurusan Lalu Lintas Giral Dalam Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, maka penulis mengusulkan bahwa di dalam pengajuan SPP Gaji, hendaknya pihak bendaharawan harus menambah salah satu syarat yang harus dilampirkan disamping daftar gaji.

Syarat tambahan tersebut berupa surat pernyataan dari bendaharawan gaji, dan diketahui oleh kepala kantornya, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hitungan-hitungan dalam daftar gaji telah dilakukan dengan tepat dan benar.
2. Pegawai negeri sipil yang terdapat dalam daftar gaji memang belum pernah dibayar dan berhak atas pembayarannya.
3. Kalau ada kekeliruan hitung atau salah bayar sehingga negara rugi, maka bendaharawan gaji bersedia mengembalikan pada teguran pertama.

4.5. Usulan Terhadap Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat

Bedasarkan hasil analisa tersebut di atas, maka penulis mengusulkan untuk supaya diberlakukannya pembatasan waktu penyelesaian SPPG (Surat Permintaan Pembayaaran Gaji) menjadi SPMG (Surat Perintah Membayar Gaji).

Pembatasan waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk SPP rutin gaji 16 jam kerja sudah harus selesai.
2. Untuk SPP rutin belanja pembangunan, 8 jam kerja.

4.6. Usulan Terhadap Peranan Lalu Lintas Giral Dalam Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, maka penulis disini mengusulkan agar urusan lalu lintas giral terutama dalam pembayaran gaji pegawai negeri sipil pusat, dapat berperan lebih baik maka pihak KPKN dan khususnya pada Seksi Bank Tunggal dengan bank sebagai mitra kerjanya perlu diadakan suatu koordinasi, karena koordinasi juga menjadi tolak ukur dalam meningkatkan urusan lalu lintas giral.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI